

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2023



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, 97124 Telp/Fax (0911) 353377
Website: www.malukuprov.go.id, Email: inspektorat@malukuprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2022

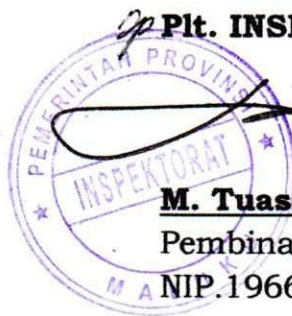
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, 27 Maret 2023

Plt. INSPEKTUR DAERAH



M. Tuasikal SE., M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19660505 199803 1 011

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku atas penggunaan anggaran. Didalamnya tertuang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LKIP ini disusun sebagai perwujudan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2022 yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dan disusun secara periodik, dengan harapan bahwa LKIP ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja selanjutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dalam Penyusunan LKIP ini tentunya terdapat kekurangan dan keterbatasan, untuk itu segala saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di tahun berikutnya. Semoga LKIP ini bermanfaat bagi yang berkepentingan dalam penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

Ambon, Februari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI MALUKU,

Drs. TITUS F. L. RENWARIN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710924 199101 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bedaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) serta Visi dan Misi Organisasi dan untuk mengetahui sejauh mana hasil akhir (Evaluasi) kinerja Dinas dengan TUPOKSI dan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

Adapun materi pokok pada laporan ini merupakan informasi mengenai capaian kinerja yang harus dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan tugas Dinas selama kurun waktu 1 (satu) tahun, hal tersebut dituangkan dalam Pengukuran Kinerja yang meliputi Capaian Indikator Kinerja Utama, Evaluasi dan Analisa Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022.

Melalui LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis serta dapat menjadi indikator bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku berperan dalam mendukung pembangunan Daerah dan masyarakat Provinsi Maluku.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi	2
C. Maksud Dan Tujuan	9
D. Isu Strategis	10
E. Sistematika Penyajian	10
 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	 12
A. Rencana Strategis	12
B. Perjanjian Kinerja	17
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	 18
A. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku	 18
B. Analisa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2022	 19
C. Realisasi Anggaran	36
 BAB IV. PENUTUP	 43
A. Kesimpulan Pencapaian Kinerja	43
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip Good Governance. Agar Good Governance menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, terintegritas dan profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari tahapan perencanaan strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilities manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada

bagiannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi, tujuan dan sasaran dari instansi yang bersangkutan.

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2022 didasari oleh Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 atas pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor : 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku pada BAB II Bagian Ketiga belas, Paragraf 1 Pasal 39ayat 1 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku mempunyai tugas “ ***Membantu Gubernur Maluku dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian serta Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi***”.

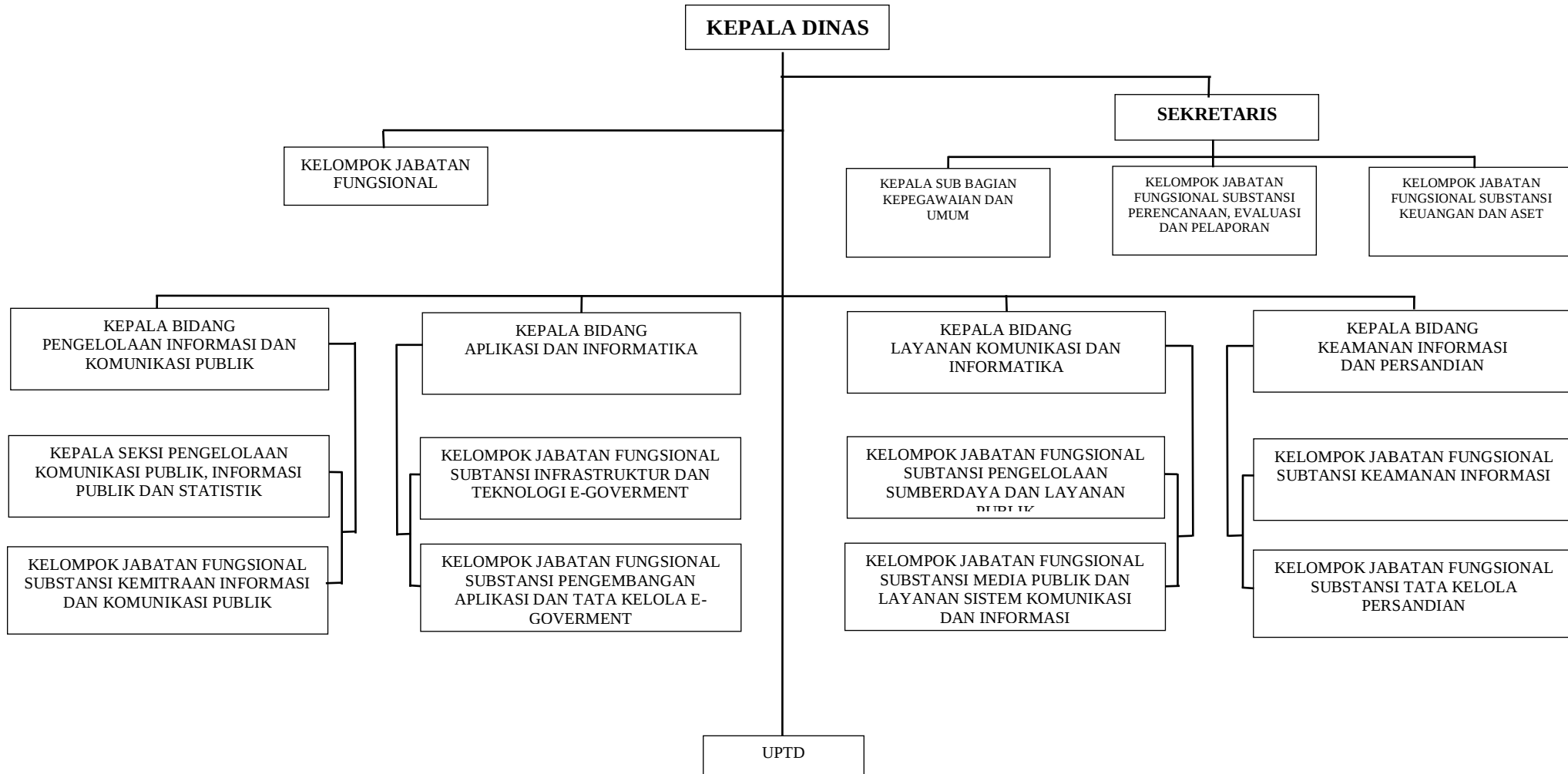
2. Fungsi

Dalam Pasal 39 ayat 2 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemda Provinsi Maluku, tugas pokok dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku adalah Membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dan Bidang Persandian serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku mempunyai fungsi:

1. Perumuskan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
4. Pembinaan teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
5. Pembinaan Unit Pelaksana teknis dinas;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU



Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset;
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, Informasi Publik dan Statistik; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
- d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Infrastruktur dan Teknologi E-Government; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E Government.
- e. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Media Publik dan Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi.
- f. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keamanan Informasi; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Tata Kelola Persandian.
- g. Unit Pelaksana teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Guna memperlancar pelaksanaan tugas dan pembangunan informasi dan komunikasi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku di dukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 43 orang ditambah 26 orang tenaga kontrak. Keadaan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku secara singkat dapat dikemukakan data Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut :

❖ ***Komposisi Status Kepegawaian :***

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	44 orang	(60 %)
2	Kontrak	29 orang	(40 %)
	Jumlah	73 orang	(100 %)

❖ ***Komposisi Jabatan PNS***

Tabel 1.2
Komposisi Jabatan PNS

No.	Jabatan PNS	Jumlah	Prosentase
1	Jabatan Struktural	6 orang	(14 %)
2	Jabatan Fungsional Tertentu	8 orang	(18 %)
3	Jabatan Fungsional Umum	30 orang	(68 %)
	Jumlah	44 orang	(100 %)

❖ **Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang**

Tabel 1.4
Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan unit dan Golongan Ruang

NO	URAIAN	GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					TOTAL
		A	B	C	D	Σ	A	B	C	D	Σ	A	B	C	D	Σ	A	B	C	D	Σ	
1	Kepala Dinas																1				1	1
2	Sekretariat					0				2	2	3	6	1	4	14	1				1	17
3	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik					0						2	1		2	5	1	1			2	7
4	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika					0				1	1	3	2		2	7	1				1	9
5	Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika)					0							1	2	1	4	1				1	5
6	Bidang Keamanan Informasi dan Persandian					0							1	1	2	4		1			1	5
7	Fungsional					0																
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	11	4	11	34	3	3	1		7	44

❖ **Komposisi Pendidikan PNS :**

Tabel 1.5
Komposisi Pendidikan PNS

No.	Pendidikan PNS	Jumlah	Prosentase
1	SD	-	(0 %)
2	SLTP	-	(0 %)
3	SLTA	11 orang	(25 %)
4	D III	1 orang	(2 %)
5	S1	22 orang	(50 %)
6	S2	10 orang	(23 %)
Jumlah		44 orang	(100 %)

❖ **Komposisi Umur PNS**

Tabel 1.6
Komposisi Umur PNS

No.	Umur PNS	Jumlah	Prosentase
1	< 25 th	2 orang	(5 %)
2	25 – 30 th	-	
3	31 – 40 th	9 orang	(20 %)
4	41 – 50 th	13 orang	(29 %)
5	51 – 55 th	10 orang	(23 %)
6	> 56 th	10 orang	(23 %)
Jumlah		44 orang	(100%)

❖ Komposisi Data Pegawai Menurut Gender

Tabel 1.7
Komposisi Data Pegawai Menurut Gender

No.	Pegawai Menurut Gender	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	15 orang	(34 %)
2	Perempuan	29 orang	(66 %)
Jumlah		44 orang	(100 %)

C. Maksud Dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tiap-tiap instansi pemerintah menuju tercapainya pemerintahan yang baik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, memiliki komitmen akan hal ini sebagaimana tercermin dalam setiap tindakan untuk selalu membuka diri (transparance) atas setiap informasi program/kegiatan yang dilaksanakan. Penyampaian LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2022 merupakan salah satu komitmen pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam mewujudkan Provinsi Maluku yang bersih, berwibawa, legitimate, bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyampaian LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2022 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

Maksud penyampaian LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran kepada semua *stakeholder* (khususnya kepada Gubernur Maluku beserta perangkat daerah lainya dan instansi penilai akuntabilitas) tentang capain kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku yang mencerminkan tingkat keberhasilan maupun

kegagalan, hambatan dan tantangan serta upaya penanggulangan pelaksanaan program/kegiatan selama Tahun 2022.

2. Tujuan

1. Untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana strategi dan rencana kinerja sasaran dan program/kegiatan yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku selama Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui masalah ataupun hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta analisa penanggulangannya selama Tahun 2022.

D. Isu Strategis

Isu – isu strategis yang dihadapi Dinas Kominfo :

1. Peningkatan Layanan Informasi Publik yang transparan dan mudah diakses bagi masyarakat.
2. Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Maluku untuk mewujudkan Satu Data Indonesia.
3. Peningkatan Keamanan Siber karena tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Peningkatan Pemanfaatan Jaringan TIK dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2022, sistematikanya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2022 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini memuat antara lain Latar belakang, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, maksud dan tujuan dan Aspek Strategis serta sistematika penyajian LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2022

BAB II PERENCANAAN KINERJA.

Bab ini menjelaskan muatan Rencana Strategi dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

Bab ini memuat antara lain uraian hasil pengukuran kinerja sasaran dari program/kegiatan maupun analisa pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh tentang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2022 berdasarkan pada analisis pencapaian kinerja yang ada.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategi suatu instansi. Selain itu perencanaan strategi merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun.

Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku secara organisatoris merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku. Oleh karena itu Rencana Strategis yang disusun pada intinya merupakan satu kesatuan dan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 12 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku yang ingin dicapai adalah :

1. Terselenggaranya Layanan Informasi Publik yang transparan dan mudah diakses
2. Tersedianya Data Statistik Sektoral
3. Terselenggaranya Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Aman

b. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :

1. Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik
2. Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektoral
3. Meningkatnya Pengelolaan Layanan Sistem Elektronik yang Aman

2. Strategi

1. Peningkatan pelayanan dalam pemanfaatan TIK.
2. Memperkuat Pengamanan Informasi Milik Pemerintah
3. Peningkatan penyebaran Informasi
4. Peningkatan pengelolaan Informasi publik
5. Peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat melalui TIK

4. Kebijakan

Adapun kebijakan nya adalah Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur jaringan TIK, keamanan, layanan informasi, pemberdayaan masyarakat dalam rangka keterbukaan informasi publik

5. Program Kegiatan Tahun 2022

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku pada tahun 2022 antara lain:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
 - c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
 - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Informasi Kepegawaian
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

- d. Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik
 - c. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
 - a. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - b. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
 - c. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
 - d. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - b. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas.

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Provinsi, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelohan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral
 - b. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral.

V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
 - a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - b. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2022 merupakan proses penetapan kegiatan Tahun 2022 dan indikator kinerjanya berdasarkan sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Perjanjian Kinerja ini memuat antara lain komponen sasaran, program, dan kegiatan serta uraian indikator dan rencana tingkat capaian (target) masing-masing komponen yang dilaksanakan dalam Tahun 2022.

Secara garis besar Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik	Persentase Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	83,33 %
2.	Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	55,6 %
3.	Meningkatnya Pengelolaan Layanan Sistem Elektronik yang Aman	Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Keamanan Informasi	13,95 %
		Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK	60 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Tahun 2022 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di Tahun 2022 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir skala nilai peringkat kinerja yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Katagori	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Untuk mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program/kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 dengan realisasinya, membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Renstra.

B. Analisa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2022

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan ke 1 “ Terselenggaranya Layanan Informasi Publik yang transparan dan mudah diakses, hasil pengukuran sasaran ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2. Sasaran 1

Sasaran 1		Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik dengan indikator kinerja, target kinerja, sebagai berikut:		
Indokator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	83,33 %	100 %	100
Rata-rata Capaian Kinerja				100

Tabel 3.3. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	-	-	100	120	100	100

Tabel 3.4. Perbandingan Kinerja Sasaran Dengan Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
1.	Persentase Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	-	100	100	90

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, searah dengan hal tersebut hak memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap manusia. Melalui penyebaran informasi dimaksudkan untuk memberikan, menyampaikan informasi yang sehat, akurat kepada masyarakat agar dapat diketahui dengan jelas tentang arah dan tujuan pembangunan yang akan ditempuh serta hasil yang telah dicapai.

Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku di sebarluaskan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan dan kebijakan Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat, Ucapan Hari Raya/Hari Besar Keagamaan, Ucapan Hari Besar Nasional, Internasional dan ucapan Selamat datang kepada Pejabat Negara atau Pimpinan Parpol atau Organisasi Kemasyarakatan atau Keagamaan dll.

Untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatkan Layanan Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik" Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku melaksanakan berbagai kegiatan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Informasi di sebarakan melalui 6 jenis media yaitu :

1. Media Luar Ruang, penyebaran informasi melalui media yang ditempatkan di ruang terbuka (outdoor/ruang publik) dengan harapan bisa diakses oleh khalayak target sebanyak-banyaknya seperti spanduk (banner), papan nama, umbul-umbul, baliho, dsb.
2. Media Elektronik, informasi kepada masyarakat melalui perangkat elektronik untuk menyebarkan berita, melalui televisi, radio, dan gawai dengan internet.
3. Media Sosial/media daring atau media online, informasi yang disebar Dinas Kominfo melalui Facebook, Instagram Twitter : *Maluku Prov*, Youtube *Maluku Prov TV* dan Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tiktok : *Diskominfo Maluku*
4. Info Publik, informasi melalui website malukuprov.go.id
5. Mobil Unit Keliling Layanan Informasi Publik bermanfaat untuk menyebarluaskan informasi secara langsung ke masyarakat.
6. Media Cetak.

No.	Media Penyebarluasan Informasi	Jumlah Layanan Informasi
1	Media Luar Ruang	707 baliho + 2.680 spanduk/banner
2	Media Elektronik (Diskominfo TV Channel):	
	a. LPP TVRI Maluku	5 Dialog Publik
	b. RRI Ambon	5 Dialog Publik
3	Media Sosial	1.752 konten
4	Info Publik (website malukuprov.go.id)	4 Sub. Domain
5	Mobil Unit Keliling Layanan Informasi Publik	10 kali siaran untuk kegiatan Covid, Pemprov Maluku dan Keagamaan
6	Media Cetak	Kerjasama dengan 10 media Cetak

Target Persentase Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Tahun 2022 sebesar 83,33 % terealisasi sebesar 100 %

dengan capaian 100 %, sedangkan realisasi ditahun 2020 ada 5 jenis media Informasi yang dilaksanakan atau sebesar 83,33 %, tahun 2022 terealisasi 6 jenis media informasi yang dilaksanakan atau sebesar 100 % dan untuk periode akhir Renstra ditargetkan 90 %.

Rumus :

$$\frac{\text{Jenis penyebarluasan informasi tahun berjalan (6)}}{\text{Jumlah jenis penyebarluasan informasi (6)}} \times 100 = 100 \%$$

Sasaran kinerja “Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik” ditunjang oleh Program/Kegiatan, Anggaran dan SDM sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	SDM
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 8,694,999,797	9 orang ASN, 8 orang tenaga Honorer

Sasaran 2 : Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektoral

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan ke 2 “ Tersedianya data Statistik Sektoral, hasil pengukuran sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Sasaran 2

Sasaran 2		Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektoral dengan indikator kinerja, target kinerja, sebagai berikut:		
Indokator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	55,6 %	70,4 %	100
Rata-rata Capaian Kinerja				100

Tabel 3.6. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	11,11	60,05	40,74	110	70,4	100

Tabel 3.7. Perbandingan Kinerja Sasaran Dengan Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
1.	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	11,11%	40,74 %	70,4 %	85,2%

Untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data pemerintahan melalui Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (Perpres No 39 Tahun 2019). Oleh karena itu, Peraturan Gubernur tentang Satu Data Provinsi Maluku (Pergub No. 80 Tahun 2020) perlu disosialisasikan, agar OPD dapat memahami dan Menyusun data statistik sektoral sesuai tugas dan wewenangnya.

Pada tahun 2022 dilaksanakan pengumpulan data statistik sektoral pada 24 OPD dan diperoleh 19 data statistik sektoral yang terkumpul yaitu :

1. Data sektoral Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku antara lain;
 - a. Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2022
 - b. Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2022
2. Data sektoral Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku yaitu Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Maluku Jenis Kelamin, Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Maluku 2022
3. Data sektoral Biro Pemerintahan Setda Maluku antara lain;
 - a. Luas Provinsi Maluku Menurut Kabupaten/ Kota dan Kecamatan 2022

- b. Daftar Nama Camat Kabupaten/ Kota Se-Maluku Tahun 2021
- c. Nama-nama Ibukota Kabupaten/ Kota, Banyaknya Kecamatan dan Desa/ Kelurahan di Provinsi Maluku 2022
- d. Nama-nama Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku dan Masa Jabatan
- e. Laporan Pelaksanaan Paten Kabupaten/Kota Tahun 2021
- 4. Data sektoral Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku antara lain;
 - a. Usaha Pertambangan Menurut Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Provinsi Maluku Tahun 2018 – 2022
 - b. Potensi Sumber Daya Mineral, Batuan Dan Batubara Di Provinsi Maluku
- 5. Data sektoral Dinas Kehutanan Provinsi Maluku antara lain;
 - a. Luas Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2022
 - b. Progres Perkembangan Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Maluku s/d Desember 2021
 - c. Data Keberadaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam / Hutan Tanaman (PBPH UPHHK-HA/HT) di Provinsi Maluku Tahun s/d Desember 2022
 - d. Daftar Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (PBPH-UIPHHK) s/d 31 Desember 2021
 - e. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan Provinsi Maluku 2022
 - f. Realisasi Produksi Kayu Bulat Provinsi Maluku Tahun 2019-2022 (m3)
 - g. Realisasi Produksi Hasil Hutan Non Kayu di Provinsi Maluku 2019-2022
 - h. Daftar Registrasi Kelompok Tani Hutan Provinsi Maluku Tahun 2021
 - i. Rekapitan Data Produksi Kayu Olahan Menurut Perusahaan di Provinsi Maluku Tahun 2019-2022
- 6. Data sektoral Dinas Kesehatan Provinsi Maluku antara lain;
 - a. Jumlah Desa/ Kelurahan yang memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku 2017 – 2022
 - b. Sarana Obat-Obatan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku 2022

- c. Cakupan Frekuensi Kunjungan Ibu Hamil dan Cakupan Imunisasi TT-2 Ibu Hamil di Puskesmas Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku 2018 – 2022
 - d. Rumah Sakit dan Kapasitas Tempat Tidur Menurut Kabupaten/ Kota dan Kepemilikan di Provinsi Maluku 2022
 - e. Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu Milik Pemerintah dan Posyandu Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku 2022
 - f. Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku 2022
 - g. Persentase Balita (2 – 4 Th) Disusui dan Tidak Disusui Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku 2018 – 2022
 - h. Bayi Lahir, Lahir Mati dan Persentase BBLR pada Rumah Sakit Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku 2018-2022
7. Data sektoral Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku yaitu Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku 2022
8. Data sektoral Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Maluku antara lain;
- a. Data Cakupan Layanan Telekomunikasi, Akses Internet, Televisi dan Radio di Provinsi Maluku
 - b. Persentase Pemanfaatan Jaringan Tik
 - c. Data Tingkat Keamanan Informasi Pemerintahan
 - d. Data Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2022
 - e. Data Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
9. Data sektoral Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku antara lain;
- a. Perkembangan Koperasi di Provinsi Maluku, 2017 – 2021
 - b. Perkembangan Koperasi Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku, 2017-2021
 - c. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Maluku
10. Data sektoral Dinas Pariwisata Provinsi Maluku antara lain;
- a. Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Maluku Menurut Kebangsaan Periode Januari s.d Maret 2022

- b. Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Maluku Menurut Daerah Asal Periode Januari s.d Maret 2022
 - c. Kunjungan Wisatawan Lokal yang Datang ke Ambon Periode Januari s.d Maret 2022
 - d. Data Kunjungan Kapal Pesiar dan Yacht yang Berkunjung di Provinsi Maluku Tahun 2022
 - e. Jumlah Wisatawan Asing yang Datang ke Destinasi Unggulan Maluku di Kecamatan Banda Tahun 2022
11. Data sektoral Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku antara lain;
- a. Data Jumlah Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Provinsi Maluku Semester I Tahun 2022
 - b. Jumlah Korban Kekerasan Pada Anak Perempuan dan Laki-Laki di Provinsi Maluku Tahun 2020 – Semester I 2022
12. Data sektoral Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku antara lain;
- a. Rencana dan Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing Menurut Bidang Usaha 2022
 - b. Rencana dan Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing Menurut Bidang Usaha dan Kabupaten/Kota 2022
 - c. Rencana dan Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Bidang Usaha dan Kabupaten/Kota 2022
 - d. Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi
13. Data sektoral Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku antara lain;
- a. Persentase Penduduk Usia Sekolah di Provinsi Maluku Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur 2022
 - b. Penduduk 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah 2022
 - c. Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Murid dan Guru Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenjang Pendidikan Negeri dan Swasta di Provinsi Maluku 2022

- d. Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Murid, Guru dan Jenjang Pendidikan Negeri di Provinsi Maluku 2018/2019 - 2021/2022
 - e. Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Murid, Guru dan Jenjang Pendidikan Swasta di Provinsi Maluku 2018/2019 - 2021/2022
 - f. Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Murid, Guru dan Jenjang Pendidikan (Negeri+ Swasta) di Provinsi Maluku 2014/2018 - 2017/2018
 - g. Ratio Murid Terhadap Sekolah, Ratio Murid Terhadap Guru dan Ratio Murid Putus Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenjang Pendidikan Negeri dan Swasta di Provinsi Maluku 2021/2022
 - h. Ratio Murid Terhadap Sekolah, Ratio Murid Terhadap Guru dan Ratio Murid Putus Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenjang Pendidikan Negeri dan Swasta di Provinsi Maluku 2018/2019 - 2021/2022
 - i. Sekolah, Ruang Kelas, Murid dan Guru Bidang Pendidikan Kejuruan Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Maluku 2018/2019 - 2021/2024
 - j. Ratio Murid Terhadap Guru SD, SMP dan SMA Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku 2021/2022
 - k. Data Murid SMA/SMK Sederajat
 - l. Data Sekolah SMA/SMK/SLB Kondisi Bangunan Baik
 - m. Data Jumlah Penduduk Disabilitas Usia 4 - 18 Tahun yang Berpartisipasi pada Pendidikan Khusus
 - n. Data Jumlah seluruh Sekolah SMA/SMK/SLB
 - o. Data Guru SMA/SMK yang Berijazah Kualifikasi
 - p. Data Jumlah Seluruh Guru SMA/SMK
 - q. Data Guru SLB yang Berijazah Kualifikasi
 - r. Data Jumlah Guru SLB
 - s. Data Jumlah Pertumbuhan Penyelenggaraan Event Seni Daerah
 - t. Data Jumlah Benda, Situs dan Kawasan dan Data Cagar Budaya yang dilestarikan di Provinsi Maluku
14. Data sektoral Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku antara lain;
- a. Data Statistik Perikanan Tangkap Dan Budidaya Tahun 2021
 - b. Data Statistik Perikanan Tangkap Dan Budidaya Semester I Tahun 2022
 - c. Rekapitulasi Data Harga Ikan Di Provinsi Maluku

- d. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016-2020 (sesuai Permendagri 86 Tahun 2017)
15. Data sektoral Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Maluku antara lain;
- a. Industri Pangan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2022
 - b. Industri Sandang Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2022
 - c. Industri Kimia Bahan Bangunan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2022
 - d. Industri Logam Elektronik Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2022
 - e. Industri Kerajinan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2022
 - f. Industri Kecil di Maluku Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2022
16. Data sektoral Dinas Pertanian Provinsi Maluku antara lain;
- a. Luas Areal,Produksi,Produktivitas dan Jumlah Petani Tanaman Perkebunan Rakyat di Provinsi Maluku diperinci per Kabupaten/ Kota (Angka Tetap 2018)
 - b. Luas Areal,Produksi,Produktivitas dan Jumlah Petani Tanaman Perkebunan Rakyat di Provinsi Maluku diperinci per Kabupaten/ Kota (Angka Tetap 2019)
 - c. Luas Areal,Produksi,Produktivitas dan Jumlah Petani Tanaman Perkebunan Rakyat di Provinsi Maluku diperinci per Kabupaten/ Kota (Angka Tetap 2020)
 - d. Luas Areal dan Produksi, Produktivitas, Jumlah Petani dan Rata-Rata Kepemilikan Lahan Tanaman Perkebunan Rakyat di Provinsi Maluku diperinci per Kabupaten/ Kota (Angka Tetap 2021)
 - e. Luas Areal dan Produksi, Produktivitas, Jumlah Petani dan Rata-Rata Kepemilikan Lahan Tanaman Perkebunan Rakyat di Provinsi Maluku diperinci per Kabupaten/ Kota (Angka Tetap 2022)
 - f. Data Perkembangan Peternakan Provinsi Maluku Populasi, Pemotongan Dan Produksi Daging Ternak Sapi (Angka Tetap 2018, 2019, 2020, dan 2021)
 - g. Data Perkembangan Peternakan Provinsi Maluku Populasi, Pemotongan Dan Produksi Daging Ternak Sapi (Angka Sementara 2022)

- h. Data Perkembangan Peternakan Provinsi Maluku Populasi, Pemotongan Dan Produksi Daging Ternak Kerbau (Angka Tetap 2018, 2019, 2020, dan 2021)
- i. Data Perkembangan Peternakan Provinsi Maluku Populasi, Pemotongan Dan Produksi Daging Ternak Kerbau (Angka Sementara 2022)
- j. Data Perkembangan Peternakan Provinsi Maluku Populasi, Pemotongan Dan Produksi Daging Ternak Kambing (Angka Tetap 2018, 2019, 2020, dan 2021)
- k. Data Perkembangan Peternakan Provinsi Maluku Populasi, Pemotongan Dan Produksi Daging Ternak Kambing (Angka Sementara 2022)
- l. Data Perkembangan Peternakan Provinsi Maluku Populasi, Pemotongan Dan Produksi Daging Ternak Babi (Angka Tetap 2018, 2019, 2020, dan 2021)
- m. Data Perkembangan Peternakan Provinsi Maluku Populasi, Pemotongan Dan Produksi Daging Ternak Babi (Angka Sementara 2022)
- n. Data Perkembangan Peternakan Provinsi Maluku Populasi, Pemotongan Dan Produksi Daging Ternak Kuda (Angka Tetap 2018, 2019, 2020, dan 2021)
- o. Data Perkembangan Peternakan Provinsi Maluku Populasi, Pemotongan Dan Produksi Daging Ternak Kuda (Angka Sementara 2022)
- p. Data Perkembangan Peternakan Provinsi Maluku Populasi, Pemotongan Dan Produksi Daging Ternak Ayam Pedaging (Angka Tetap 2018, 2019, 2020, dan 2021)
- q. Data Perkembangan Peternakan Provinsi Maluku Populasi, Pemotongan Dan Produksi Daging Ternak Ayam Pedaging (Angka Sementara 2022)
- r. Data Perkembangan Peternakan Provinsi Maluku Populasi, Pemotongan Dan Produksi Daging Ternak Domba (Angka Tetap 2018, 2019, 2020, dan 2021)
- s. Data Perkembangan Peternakan Provinsi Maluku Populasi, Pemotongan Dan Produksi Daging Ternak Domba (Angka Sementara 2022)
- t. Produksi Padi dan Palawija di Provinsi Maluku Tahun 2008 – 2017

17. Data sektoral Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Maluku yaitu Panjang Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2022
18. Data sektoral Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Rakyat Provinsi Maluku antara lain;
 - a. Data Desa Maju Provinsi Maluku
 - b. Data Jumlah Bumdes yang Berkembang
 - c. Data Jumlah Kawasan Perdesaan Yang Berkembang
 - d. Data Jumlah Kepala Desa Definitif
19. Data sektoral Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku antara lain;
 - a. Data Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif
 - b. Data Jumlah Pemuda yang aktif dalam kepeloporan, kepramukaan dan kepemimpinan pemuda
 - c. Data Jumlah Wirausaha Muda di Maluku yang difasilitasi
 - d. Data Jumlah Atlit Berprestasi dan Data jumlah cabor yang dibina dalam masyarakat
 - e. Data Persentasi Tenaga/Pelatih Olahraga yang Bersertifikasi pelatih di Maluku
 - f. Data Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Memadai
 - g. Data Jumlah seluruh Organisasi Pemuda di Maluku

Sehingga perolehan data yang didapat pada tahun 2022 adalah 19 data sektoral dari OPD Provinsi Maluku.

Dengan demikian Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia pada tahun 2022 terealisasi sebesar 70,4 % atau 19 data dari yang di targetkan di tahun 2022 yaitu 55,6 % atau 15 data. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 Persentase Data Statistik yang Tersedia mengalami kenaikan sekitar 29,7 % semakin baik, diharapkan pada masa akhir Periode Renstra nanti di tahun 2024 Dinas kominfo dapat mencapai target yaitu 23 data OPD atau 85,2 %.

Realisasi Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia ini diperoleh dari rumus :

$$\frac{\text{Jumlah data statistik yang masuk (19)}}{\text{Jumlah seluruh data statistik (27)}} \times 100 = 70,4 \%$$

Sasaran kinerja “Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektoral” ditunjang oleh Program/Kegiatan, Anggaran dan SDM sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	SDM
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Provinsi	Rp. 197.599.754	7 orang ASN

Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Layanan Sistem Elektronik yang Aman

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan ke 3 “ Terselenggaranya Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Aman, hasil pengukuran sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Sasaran 3

Sasaran 3		Meningkatnya Pengelolaan Layanan Sistem Elektronik yang Aman dengan indikator kinerja, target kinerja, sebagai berikut:		
Indokator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase aplikasi yang memenuhi standar keamanan informasi	13,95%	0 %	0
2	Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK	60 %	88,8 %	100

Tabel 3.9. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase aplikasi yang memenuhi standar keamanan informasi	-	-	3,49 %	37,53 %	0 %	0
2.	Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK	32 %	62,5 %	40,8 %	136 %	88,8 %	100

Tabel 3.10. Perbandingan Kinerja Sasaran Dengan Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
1.	Persentase aplikasi yang memenuhi standar keamanan informasi	-	3,49 %	0 %	23,25 %
2.	Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK	32 %	40,8 %	88,8 %	80 %

1. Persentase Aplikasi yang memenuhi Standar Keamanan Informasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dalam meningkatkan pengamanan informasi bekerja sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk melakukan ITSA (IT Security Assesment). Standar keamanan yang digunakan adalah Standar yang dimiliki organisasi nirlaba internasional “OWASP (Open Web Application Security Project)” yaitu ASVS atau Aplikasi Security Verification Standart adalah daftar persyaratan untuk memberitahu apakah sebuah aplikasi itu aman untuk digunakan oleh organisasi,vendor dan costumer.

Mulai tahun 2020 sampai tahun 2021 ITSA sudah dilakukan terhadap 7 aplikasi yang dimiliki OPD lingkup pemerintah provinsi Maluku dan sesuai hasil pengujian atau penetrasian testing pada 7 aplikasi tersebut ternyata memiliki celah keamanan yang beragam mulai dari resiko high sampai low, yaitu :

1. *malukuprov.go.id*
2. *simpeg.malukuprov.go.id*
3. *disperindag.malukuprov.go.id*
4. *eis.ulatindagmal.com*

5. *esamsat.malukuprov.go.id*
6. *dinkes.malukuprov.go.id*
7. *surat.dinkesmalukuprov.com*

Berdasarkan hasil ITSA aplikasi yang memenuhi standar keamanan informasi yaitu 6 aplikasi :

1. *malukuprov.go.id*
2. *simpeg.malukuprov.go.id*
3. *disperindag.malukuprov.go.id*
4. *eis.ulatindagmal.com*
5. *dinkes.malukuprov.go.id*
6. *surat.dinkesmalukuprov.com*

Namun tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan personal dari Badan Siber dan Sandi Negara yang melayani 34 Provinsi sehingga Pelaksanaan ITSA tidak dapat terlaksana. Sehubungan dengan itu, maka tahun 2022 tidak terealisasi pelaksanaannya.

Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Keamanan Informasi dari 48 aplikasi yang ada pada OPD (aplikasi yang terdaftar pada Domain *malukuprov.go.id*) dan diakhir periode renstra ditargetkan 16 aplikasi yang sudah diamankan.

Terdapat perubahan data aplikasi yang dikelola oleh OPD yang semula 86 aplikasi menjadi 48 aplikasi, hal ini dikarenakan ketidakaktifan penggunaannya.

Realisasi Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Keamanan Informasi ini diperoleh dari rumus :

$$\frac{\text{Jumlah aplikasi yg memenuhi standar keamanan informasi (0)}}{\text{Jumlah aplikasi yang ada pada OPD (86)}} \times 100 = 0 \%$$

Sasaran kinerja “Meningkatnya Pengelolaan Layanan Sistem Elektronik yang Aman” dengan indikator “Persentase aplikasi yang memenuhi standar keamanan informasi” ditunjang oleh Program/Kegiatan, Anggaran dan SDM sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	SDM
1.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 200.000.000	5 orang ASN 1 orang tenaga Honorer

2. Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK

Pemanfaatan Jaringan TIK merupakan pemanfaatan layanan akses internet yang terdapat pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, bertujuan untuk :

1. Menyediakan akses internet pada Kantor Gubernur, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Dinas Sosial Provinsi Maluku dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku untuk memudahkan ASN dalam mengakses internet demi mendukung kinerja.
2. Untuk kelancaran layanan Website Pemerintah Provinsi Maluku kepada masyarakat.

Tahun 2022 Dinas Kominfo Prov. Maluku menyewa Astinet dengan besaran Bandwith sebesar 222 Mbps yang terbagi di 4 Lokasi (30 titik pengguna) yaitu :

a. Astinet dengan Bandwith sebesar 100 Mbps digunakan untuk melayani akses internet di:

- Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
- Dinas Sosial Provinsi Maluku
- Kantor Gubernur yang terdiri dari 14 OPD dan 12 titik pengguna lainnya

yaitu :

1. Biro Umum Setda Maluku
2. Biro Organisasi Setda Maluku
3. Biro Perekonomian Setda Maluku
4. Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku
5. Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Maluku
6. Biro Pemerintahan Setda Maluku
7. Bappeda Provinsi Maluku
8. BKD Provinsi Maluku
9. Biro Hukum Setda Maluku
10. Biro kesra Setda Maluku
11. Inspektorat Provinsi Maluku
12. Badan Perbatasan Provinsi Maluku
13. BPKAD Provinsi Maluku
14. Kesbangpol Provinsi Maluku
15. Ruang UKPBJ
16. Ruang Sekretariat Gubernur
17. Ruang Sekretariat Wakil Gubernur
18. Ruang Sekretariat Sekda
19. Ruang Assisten I
20. Ruang Asisten II
21. Ruang Asisten III
22. Ruang Staf Ahli
23. Ruang TGPP
24. Ruang Rapat Lantai 6
25. Ruang Rapat Lantai 2
26. Aula Lantai 7

- b. Astinet dengan Bandwith sebesar 100 Mbps digunakan untuk melayani akses internet di Dinas Kominfo Prov. Maluku.

- c. Astinet dengan Bandwith sebesar 22 Mbps digunakan untuk melayani akses internet kegiatan administrasi pimpinan di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur.

Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK yang dilaksanakan Dinas Kominfo tahun 2022 terealisasi sebesar 88,8 % atau 222 Mbps melebihi yang ditargetkan tahun 2022 yaitu 60 % atau 150 Mbps, dibandingkan Tahun 2021 Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK sebesar 40,8 % mengalami kenaikan sekitar 48 % dan diakhir periode Renstra di targetkan sebesar 90 % atau 225 Mbps.

Realisasi Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK ini diperoleh dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah besaran bandwith yang dipakai (222)}}{\text{Jumlah besaran bandwit yang ditargetkan (250)}} \times 100 = 88,8 \%$$

Sasaran kinerja “Meningkatnya Pengelolaan Layanan Sistem Elektronik yang Aman” dengan indikator “Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK” ditunjang oleh Program/Kegiatan, Anggaran dan SDM sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	SDM
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, 1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 2. Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 6,433,685,642	5 orang ASN 3 orang tenaga Honorer

C. Realisasi Anggaran

Berikut adalah capaian keuangan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku pada Tahun 2022 :

Tabel 3.11.
Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa	%
A.	Belanja Daerah	26,167,818,626	29,478,670,672	28,177,167,013	1,301,503,659	95.58
I.	Belanja Tidak Langsung	5,332,538,386	4,550,790,751	4,330,679,472	220,111,279	95.16
2.	Belanja Langsung	20,835,280,240	24,927,879,921	23,846,487,541	1,081,392,380	95.66
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10,653,653,495	13,952,385,479	13,307,613,966	644,771,513	95.38
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	499,415,204	499,415,204	404,315,798	95,099,406	80.96
	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	464,054,988	464,054,988	39.561,875	95,099,406	79,51
	1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,626,600	6,626,600	6,626,600	0	100
	1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,845,199	5,845,199	4.995.730	0	100
	1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7,344,850	7,344,850	7,344,850	0	100
	1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7,585,456	7,585,456	7,585,456	0	100
	1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	7,958,111	7,958,111	7,958,111	0	100
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,343,536,864	4,562,338,151	4,342,226,872	220,111,279	95.16
	2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,332,538,386	4,550,790,751	4,330,679,472	220,111,279	95.16

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa	%
	2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,297,850	6,297,850	6,297,850	0	100
	2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	5,249,550	5,249,550	6,297,850	0	100
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20,997,500	20,997,500	20,997,500	0	100
	3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	5,249,300	5,249,300	5,249,300	0	100
	3.2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	5,249,500	5,249,500	5,249,500	0	100
	3.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,498,700	10,498,700	10,498,700	0	100
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82,803,106	82,803,106	82,803,106	0	100
	4.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5,673,700	5,673,700	5,673,700	0	88,75
	4.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	21,724,455	21,724,455	21,724,455	0	100
	4.3 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5,389,751	5,389,751	5,389,751	0	100
	4.4 Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50,015,200	50,015,200	50,015,200	1,500,000	97.00
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	522,757,850	522,757,850	517,563,868	5,193,982	99,01
	5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	45,874,700	45,874,700	45,874,700	0	100

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa	%
	5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	156,552,000	156,552,000	156,552,000	0	100
	5.3 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	26,867,150	26,867,150	26,867,150	0	100
	5.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2,115,000	2,115,000	1,995,000	120,000	94.33
	5.5 Fasilitas Kunjungan Tamu	20,993,000	20,993,000	20,993,000	0	100
	5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270,356,000	270,356,000	265,282,018	5,073,982	98.12
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6,283,491,300	6,283,491,300	6,022,902,358	260,588,942	95.85
	6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas	74,560,000	74,560,000	70,960,000	3,600,000	95.17
	6.2 Pengadaan Mebel	67,400,000	67,400,000	67,300,000	100,000	99.85
	6.3 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3.000.000,000	5,850,000,000	5,594,803,908	255,196,092	95.64
	6.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	291,531,300	291,531,300	289,838,450	1,692,850	99.42
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,126,315,968	1,126,315,968	1,087,449,407	38,866,561	96.55
	7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,520,000	2,520,000	2,520,000	0	100
	7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181,008,000	181,008,000	181,008,000	0	100
	7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	942,787,968	942,787,968	903,921,407	38,866,561	95.88

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa	%
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	854,266,400	854,266,400	830,855,057	23,411,343	97.26
	8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	299,866,400	299,866,400	277,776,659	22,089,741	92.63
	8.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	524,400,000	524,400,000	523,078,398	1,321,602	99.75
	8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	100
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	7,849,999,870	8,694,999,797	8,422,883,375	272,116,422	96.87
	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	7,849,999,870	8,694,999,797	8,569,665,771	272,116,422	96.87
	1.1 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2,899,999,960	3,199,999,960	3,136,643,175	63,356,785	98.02
	1.2 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2,250,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	100
	1.3 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	699,999,960	944,999,887	771,839,021	173,160,866	81.68
	1.4 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1,999,999,950	2,149,999,950	2,113,383,648	36,616,302	98.30
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6,433,685,642	6,433,685,642	5,975,629,576	458,056,066	92.88

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa	%
	1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	6,391,245,742	6,391,245,742	5,946,489,676	444,756,066	93.04
	1.1 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	6,391,245,742	6,391,245,742	5,946,489,676	444,756,066	93.04
	2. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	42,439,900	42,439,900	29,139,900	13,300,000	68.66
	2.1 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	40,864,200	40,864,200	27,564,200	13,300,000	67.45
	2.2 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	1,575,700	1,575,700	1,575,700	0	100
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	197,599,754	197,599,754	140,973,782	56,625,972	71.34
	1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	197,599,754	197,599,754	140,973,782	56,625,972	71.34
	1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	91,337,220	91,337,220	67,638,189	23,699,031	74.05
	1.2 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	16,665,384	16,665,384	15,013,723	1,651,661	90.09
	1.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	89,597,150	89,597,150	58,321,870	31,275,280	65.09

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa	%
5.	<i>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</i>	<i>200,000,000</i>	<i>200,000,000</i>	<i>183,313,450</i>	<i>16,686,550</i>	<i>91.66</i>
	1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	200,000,000	200,000,000	183,313,450	16,686,550	91.66
	1.1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	80,000,000	80,000,000	79,917,350	82,650	99.90
	1.2 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	120,000,000	120,000,000	103,396,100	16,603,900	86.16

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan Pencapaian Kinerja

Dari pengukuran sasaran kinerja yang dilakukan pada Bab III dapat disimpulkan capaian sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Capaian Sasaran Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

No.	Sasaran Kinerja	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik dengan indikator kinerja	100	Sangat Memuaskan
2.	Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektoral dengan indikator kinerja	100	Sangat Memuaskan
3.	Meningkatnya Pengelolaan Layanan Sistem Elektronik yang Aman dengan indikator kinerja	0	Sangat Kurang
		88,8	Memuaskan
Rata-Rata Capaian Kinerja		72,2	Sangat Baik

Sebagaimana tabel diatas secara umum kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah **“Sangat Baik”**, berikut adalah simpulan terhadap isu strategis atau masalah yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku tahun 2022 serta saran tindak teknis yang diperlukan ditahun mendatang.

1. Peningkatan Layanan Informasi Publik yang transparan dan mudah diakses bagi masyarakat.

Layanan informasi publik sudah terlaksana namun belum optimal karena :

- terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki disiplin ilmu komunikasi, kehumasan, design grafis.
- Terbatasnya alat penunjang kegiatan dokumentasi dan publikasi Pemerintah Daerah

Solusi untuk permasalahan Layanan informasi publik adalah :

- Mengajukan surat permintaan ASN yang berlatar belakang pendidikan ilmu komunikasi, kehumasan dan design grafis ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku.
- Usulan penambahan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan dokumentasi dan publikasi pemerintah daerah.

2. Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Maluku untuk mewujudkan Satu Data Indonesia.

Penyediaan Data Statistik Sektoral dalam penyelenggaraan Satu Data Provinsi Maluku sudah berjalan namun ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki antara lain :

- Belum maksimal karena OPD sebagai Produsen Data belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur No. 80 Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data Provinsi Maluku.
- Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana dalam pengelolaan data statistik.

Solusi untuk permasalahan penyediaan data sektoral :

- Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis prinsip Satu Data Indonesia sesuai Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 serta sosialisasi pemahaman pentingnya Satu Data Provinsi Maluku sesuai Peraturan Gubernur No. 80 Tahun 2020.

- Usulan penambahan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan statistik.

3. Peningkatan Keamanan Siber karena tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dalam meningkatkan pengamanan informasi bekerja sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk melakukan ITSA (IT Security Assesment). Namun tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan personal dari Badan Siber dan Sandi Negara yang melayani 34 Provinsi sehingga Pelaksanaan ITSA tidak dapat terlaksana. Sehubungan dengan itu, maka tahun 2022 tidak terealisasi pelaksanaannya.

Solusi permasalahan direncanakan akan di laksanakan ITSA pada awal Tahun 2023.

4. Peningkatan Pemanfaatan Jaringan TIK dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Akses internet yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sudah berjalan namun belum optimal karena :

- Belum memenuhi kebutuhan pengguna layanan akses internet karena banyaknya pengguna layanan yang hanya dilayani oleh bandwidth sebesar 222 Mbps yang terbagi di 4 Lokasi (30 titik pengguna).
- Belum dapat melayani seluruh OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku karena keterbatasan anggaran.

Solusi permasalahan layanan akses internet dapat dilaksanakan dengan :

- Melakukan maintenance/perbaikan jaringan akses internet dan
- Mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Maluku pada periode berikut.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI MALUKU,



Drs. TITUS F. L. RENWARIN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710924 199101 1 003

L A M P I R A N

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Maluku

Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								26,659,626,655			27,992,293,059		
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								11,273,384,575			11,836,738,874		
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								556,902,133			584,747,240		
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Prengkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	1 dokumen	8 dokumen	526,993,147	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	553,342,804
2	16	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	1 dokumen	8 dokumen	5,768,763	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	6,057,201
2	16	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Tersusunnya Perubahan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	1 dokumen	8 dokumen	5,245,517	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	5,507,793
2	16	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	1 dokumen	8 dokumen	7,348,193	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	7,715,603
2	16	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan		jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia		37 dokumen		8 dokumen	5,247,941	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	5,510,338
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Tersusunnya Laporan Capaian dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	3 dokumen	8 dokumen	6,298,572	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	6,613,501
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6,969,451,193			7,317,608,821		
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan ASN	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	14 bulan	3 dokumen	6,957,902,791	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	7,305,797,931

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Maluku

Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan ASN	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	6,298,637	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	6,298,637
2	16	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan ASN	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	5,249,765	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	5,512,253
2	16	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								20,998,247	22,048,159				
2	16	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Tersusunnya Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	5,249,596	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	5,512,076
2	16	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Brang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	1 laporan	3 dokumen	5,249,785	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	5,512,274
2	16	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	1 kegiatan	3 dokumen	10,498,866	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	11,023,809
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								501,514,264	526,589,979				
2	16	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olahraga bagi aparatur	Jumlah ASN yang berkoptensi tinggi	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	70 buah	54 orang	40,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	42,446,250
2	16	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya bagi Aparatur	Jumlah ASN yang berkoptensi tinggi	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	70 buah	54 orang	45,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	47,775,000
2	16	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang berkoptensi tinggi	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	1 kegiatan	54 orang	8,399,247	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	8,819,209

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Maluku

Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistim informasi kepegawaian	Jumlah ASN yang berkoptensi tinggi	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	1 kegiatan	54 orang	5,243,491	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	5,505,666
2	16	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah ASN yang berkoptensi tinggi	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	1 laporan	54 orang	5,241,890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	5,503,985
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya Diklat Teknis bagi Aparatur Kominfo	Jumlah ASN yang berkoptensi tinggi	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	18 Orang	54 orang	251,215,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	263,776,433
2	16	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang berkoptensi tinggi	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	47 OPD	54 orang	66,761,876	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	70,099,970
2	16	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang berkoptensi tinggi	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	1 keg	54 orang	78,727,110	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	82,663,466
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								547,113,699	574,469,384				
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan administrasi umum yang tersedia	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	100 buah	20000 buah	48,169,622	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	50,578,103
2	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya Penyediaan ATK, Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	Jumlah kebutuhan administrasi umum yang tersedia	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	850 buah	20000 buah	162,152,204	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	170,259,814
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan administrasi umum yang tersedia	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	6500 eksempla	20000 buah	28,213,358	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	29,624,026

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Maluku
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah kebutuhan administrasi umum yang tersedia	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	470 eksemplar	20000 buah	8,394,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	8,814,488
2	16	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah kebutuhan administrasi umum yang tersedia	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	600 kali	20000 buah	22,040,865	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	23,142,908
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kebutuhan administrasi umum yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	9 kali	20000 buah	278,142,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	292,050,045
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								455,312,981	478,078,630				
2	16	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya pengadaan kendaraan roda empat dan roda dua	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	5 unit	48 buah	155,439,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	163,211,895
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya pengadaan mebel untuk kantor	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	10 buah	48 buah	25,138,575	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	26,395,504
2	16	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya Pengadaan Rangka Baliho Paten	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	1 rangka	48 buah	26,180,343	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	27,489,360
2	16	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	20 buah	48 buah	175,106,663	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	183,861,996
2	16	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	12 unit	48 buah	73,447,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	77,119,875
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,420,140,278	1,491,147,292				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Maluku

Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya administrasi perkantoran secara tertib	Jumlah tenaga jasa penunjang administrasi yang tersedia	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	450 buah	28 orang	2,623,005	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	2,754,155
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya penyediaan jasa telekomunikasi. sumber daya air dan listrik	Jumlah tenaga jasa penunjang administrasi yang tersedia	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	2 unit	28 orang	173,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	181,912,500
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya penyediaan jasa tenaga administrasi perkantoran dan tenaga kebersihan kantor	Jumlah tenaga jasa penunjang administrasi yang tersedia	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	28 orang	28 orang	1,244,267,273	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	1,306,480,637
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								801,951,780	842,049,369				
2	16	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas dan bangunan kantor serta fasilitas lain yang terawat	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	11 unit	12 unit	419,783,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	440,772,444
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya Pemeliharaan secara rutin gedung kantor	Jumlah kendaraan dinas dan bangunan kantor serta fasilitas lain yang terawat	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	1 kali	12 unit	340,588,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	357,617,925
2	16	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor secara rutin	Jumlah kendaraan dinas dan bangunan kantor serta fasilitas lain yang terawat	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 dokumen	16 unit	12 unit	41,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen penunjang usuran pemerintah daerah yang dihasilkan	37 dokumen	43,659,000
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								6,902,723,854	7,247,860,047				
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi								6,902,723,854	7,247,860,047				
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi	Jumlah pemanfaatan media komunikasi publik bagi masyarakat	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 kali	1 dokumen	4 media	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	11 kali	63,000,000
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	Terlaksananya monitoring opini dan aspirasi publik di media massa dan media sosial	Jumlah pemanfaatan media komunikasi publik bagi masyarakat	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 kali	1 dokumen	4 media	57,749,929	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	11 kali	60,637,425

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Maluku

Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	Terlaksananya monitoring dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Jumlah pemanfaatan media komunikasi publik bagi masyarakat	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 kali	1 dokumen	4 media	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	11 kali	84,000,000
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	Tersedianya Informasi dan konten komunikasi publik kepada masyarakat	Jumlah pemanfaatan media komunikasi publik bagi masyarakat	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 kali	4 jenis	4 media	2,388,644,595	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	11 kali	2,508,076,825
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	Terlaksananya operasional media komunikasi publik milik pemerintah daerah	Jumlah pemanfaatan media komunikasi publik bagi masyarakat	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 kali	12 bulan	4 media	188,999,874	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	11 kali	198,449,868
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	Terlaksananya pengelolaan informasi publik tentang keterbukaan informasi publik	Jumlah pemanfaatan media komunikasi publik bagi masyarakat	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 kali	1 kegiatan	4 media	42,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	11 kali	44,100,000
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	Terlaksananya pengelolaan hubungan dengan media	Jumlah pemanfaatan media komunikasi publik bagi masyarakat	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 kali	1 kegiatan	4 media	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	11 kali	525,000,000
2	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	Terlaksananya pengelolaan hubungan dengan komunitas informasi dan komunikasi publik	Jumlah pemanfaatan media komunikasi publik bagi masyarakat	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 kali	1 kegiatan	4 media	65,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	11 kali	68,355,000
2	16	02	1.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	Terlaksananya penanganan krisis komunikasi publik	Jumlah pemanfaatan media komunikasi publik bagi masyarakat	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 kali	1 kegiatan	4 media	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	11 kali	52,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Maluku

Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	Terlaksananya Bimtek/Pelatihan untuk peningkatan literasi digital	Jumlah pemanfaatan media komunikasi publik bagi masyarakat	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 kali	75 orang	4 media	55,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	11 kali	57,991,500
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah pemanfaatan media komunikasi publik bagi masyarakat	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 kali	100 %	4 media	314,999,456	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	11 kali	330,749,429
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	Terlaksananya hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Jumlah pemanfaatan media komunikasi publik bagi masyarakat	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 kali	1 kegiatan	4 media	3,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	11 kali	3,150,000,000
2	16	02	1.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi	Jumlah pemanfaatan media komunikasi publik bagi masyarakat	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 kali	1 kegiatan	4 media	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik Publik yang diselenggarakan	11 kali	105,000,000
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								8,483,518,226			8,907,694,138		
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								7,866,998,253			8,260,348,166		
2	16	03	1.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata cara pengelolaan domain dan Sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	Jumlah Jumlah Pemanfaatan domain dan sub domain pemerintah daerah Provinsi	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 OPD	4 kegiatan	46 OPD	388,770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	46 OPD	408,208,500
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan nama domain dan sub domain lingkup Pemerintah Provinsi Maluku	Jumlah Jumlah Pemanfaatan domain dan sub domain pemerintah daerah Provinsi	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 OPD	3 kegiatan	46 OPD	1,178,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	46 OPD	1,237,141,500
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	Terlaksananya penyediaan akses internet bagi pelayanan publik dan pemerintah daerah	Jumlah Jumlah Pemanfaatan domain dan sub domain pemerintah daerah Provinsi	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 OPD	193 lokasi	46 OPD	6,299,998,253	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	46 OPD	6,614,998,166
2	16	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								616,519,973			647,345,972		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Maluku

Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	Terlaksananya kegiatan sosialisasi penatalaksanaan dan pengawasan e-government	Jumlah OPD yang memanfaatkan SPBE	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 OPD	46 OPD	46 OPD	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	46 OPD	21,000,000
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	Terlaksananya kegiatan asistensi rencana induk pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah OPD yang memanfaatkan SPBE	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 OPD	46 OPD	46 OPD	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	46 OPD	21,000,000
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	Terlaksananya penyediaan dokumen rencana keberlangsungan kegiatan pengelolaan pusat data dan peningkatan kopetensi SDM	Jumlah OPD yang memanfaatkan SPBE	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 OPD	1 dokumen	46 OPD	56,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	46 OPD	58,800,000
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	Terlaksananya maintenance website lembaga pemerintah daerah	Jumlah OPD yang memanfaatkan SPBE	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 OPD	1 kegiatan	46 OPD	328,019,973	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	46 OPD	344,420,972
2	16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	Terlaksananya koordinasi dan peningkatan kompetensi SDM Pelaksana/Pengelola	Jumlah OPD yang memanfaatkan SPBE	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 OPD	3 kegiatan	46 OPD	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	46 OPD	21,000,000
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	Terlaksananya koordinasi dan peningkatan kompetensi SDM Pelaksana/Pengelola	Jumlah OPD yang memanfaatkan SPBE	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 OPD	1 dokumen	46 OPD	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	46 OPD	21,000,000
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	Terlaksananya pengembangan aplikasi khusus	Jumlah OPD yang memanfaatkan SPBE	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 OPD	1 dokumen	46 OPD	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	46 OPD	21,000,000
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	Koordinasi pengembangan SPLPD	Jumlah OPD yang memanfaatkan SPBE	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 OPD	1 dokumen	46 OPD	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	46 OPD	21,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Maluku
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	Terlaksananya Penyusunan Komite Provinsi Cerdas	Jumlah OPD yang memanfaatkan SPBE	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 OPD	1 dokumen	46 OPD	20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	46 OPD	21,000,000
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM pelaksana/pengelola	Jumlah OPD yang memanfaatkan SPBE	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 OPD	3 kegiatan	46 OPD	20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	46 OPD	21,000,000
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM dan Penetapan GCIO Maluku	Jumlah OPD yang memanfaatkan SPBE	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 OPD	11 Kabupaten/Kota	46 OPD	20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	46 OPD	21,000,000
2	16	03	1.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi SPBE	Jumlah OPD yang memanfaatkan SPBE	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 OPD	1 dokumen	46 OPD	52,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah pemanfaatan SPBE yang erintegrasi dalam sistim Pemerintahan daerah	46 OPD	55,125,000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								560,999,016			589,048,966		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								560,999,016			589,048,966		
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi								560,999,016			589,048,966		
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang diperoleh	Terlaksananya pengumpulan data satatistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,62 %	47.62 %	47.62 %	167,999,708	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah data statistik sektoral yang diperoleh	47,62 %	176,399,693
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah data statistik sektoral yang diperoleh	Terlaksananya Peningkatan mutu SDM statistik sektoral Daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,62 %	2 orang	47.62 %	75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah data statistik sektoral yang diperoleh	47,62 %	78,750,000
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang diperoleh	Terlaksananya Pembuatan metadata statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,62 %	1 kegiatan	47.62 %	52,499,669	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah data statistik sektoral yang diperoleh	47,62 %	55,124,652
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang diperoleh	Terlaksananya Diklat bagi OPD terkait Kelembagaan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,62 %	100 %	47.62 %	115,499,639	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah data statistik sektoral yang diperoleh	47,62 %	121,274,621

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Maluku

Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	20	02	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah data statistik sektoral yang diperoleh	Terlaksananya penyediaan infrastruktur Pengembangan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,62 %	5 unit	47.62 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah data statistik sektoral yang diperoleh	47,62 %	105,000,000
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang diperoleh	Terlaksananya Penyelenggaraan otoritas statistik sektoral di daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,62 %	1 kegiatan	47.62 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah data statistik sektoral yang diperoleh	47,62 %	52,500,000
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							477,113,636	500,969,318					
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							477,113,636	500,969,318					
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi							394,796,556	414,536,384					
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD yang sudah menerapkan Penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi	Terlaksananya Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah daerah	Jumlah OPD yang telah terintegasi dengan keamanan informasi dan persandian	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 OPD	1 dokumen	46 OPD	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah OPD yang sudah menerapkan Penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi	46 OPD	52,500,000
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD yang sudah menerapkan Penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM Keamanan Informasi	Jumlah OPD yang telah terintegasi dengan keamanan informasi dan persandian	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 OPD	2 orang	46 OPD	24,986,336	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah OPD yang sudah menerapkan Penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi	46 OPD	26,235,653
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah OPD yang sudah menerapkan Penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi	Terlaksananya penyediaan infrastruktur, Perangkat keras teknologi keamanan informasi	Jumlah OPD yang telah terintegasi dengan keamanan informasi dan persandian	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 OPD	2 unit	46 OPD	88,609,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah OPD yang sudah menerapkan Penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi	46 OPD	93,039,975
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD yang sudah menerapkan Penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi	Terlaksananya sosialisasi keamanan informasi, Bimtek ITSA dan Cyber drill	Jumlah OPD yang telah terintegasi dengan keamanan informasi dan persandian	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 OPD	65 orang	46 OPD	231,200,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah OPD yang sudah menerapkan Penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi	46 OPD	242,760,756
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi							82,317,080	86,432,934					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Maluku
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pengamanan dan pola hubungan keamanan informasi pemerintah daerah yang dilakukan	Terlaksananya identifikasi jaring komunikasi sandi	Jumlah OPD yang sudah menerapkan Pola hubungan keamanan komunikasi sandi	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 OPD	46 OPD	46 OPD	82,317,080	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah pengamanan dan pola hubungan keamanan informasi pemerintah daerah yang dilakukan	46 OPD	86,432,934
TOTAL													27,697,739,307	29,082,311,343				



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Murad Ismail
Jabatan : Gubernur Maluku
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Tahun 2022 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, Maret 2022

Pihak Kedua,

Murad Ismail
Gubernur Maluku

Pihak Pertama,

Drs. Titus F.L. Renwarin, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710924 199103 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik	Persentase Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	83,33%
2	Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	55,6%
3	Meningkatnya Pengelolaan Layanan Sistem Elektronik yang Aman	Persentase Aplikasi yang memenuhi Standar Keamanan Informasi	13,95%
		Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK	60%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 6.551.594.728	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 7.849.999.870	APBD
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 6.433.685.642	APBD
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 200.000.000	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 197.599.754	APBD


 Gubernur Maluku,

Murad Ismail

Ambon, Maret 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Maluku,




Drs. Titus F.L. Renwarin, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710924 199103 1 003